

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakekat sosialitas (kebersamaan) berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi.<sup>1</sup> Secara alamiah untuk kelangsungan hidup manusia, masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan.

Di Indonesia, peraturan terkait perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai suatu unifikasi hukum di bidang perkawinan Undang-Undang Perkawinan tersebut dibentuk sesuai dengan dasar filosofis bangsa Indonesia yang majemuk dengan adanya 5 (lima) agama dan beraneka ragam adat istiadat maupun kebiasaan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, sehingga untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berpedoman pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik. Artinya di Indonesia masih berlaku

---

1 Hadari Nawawi. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Penerbit : Gadjah Mada University Press. Hal. 4

beberapa hukum perkawinan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia antara lain:<sup>2</sup>

- a. Hukum perkawinan menurut hukum perdata barat (BW) yang diperuntukan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen.
- b. Hukum perkawinan menurut hukum islam yang diperuntukan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama islam.
- c. Hukum perkawinan menurut hukum adat yang diperuntukan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan<sup>3</sup>

*“perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir batin saja namun kedua-duanya saling terkait dan mendukung. Melihat pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 tersebut sudah jelas bahwa perkawinan menurut hukum Indonesia tidak hanya berkaitan dengan suatu proses administrasi atau hubungan keperdataan antara

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Penerbit : Kencana Prenada Media Group. hal. 97

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

suami dan istri, melainkan lebih menekankan pada adanya ikatan lahir batin yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Disebut perbuatan hukum karena perbuatan tersebut menimbulkan adanya suatu akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan ajaran kepercayaan masing-masing.

Perkawinan pada umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahapan yang menjadi pra syarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut diantaranya adalah masa perkenalan, kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan dan masa berkencan. Selanjutnya, Setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.<sup>4</sup>

Dalam pandangan hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian

---

4 Narwoko. 2009. *Dalam Kartamuda Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya. Penerbit : Airlangga, Uversity press. Hal. 25

dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.<sup>5</sup> Sehingga fatal akibatnya apabila tidak menepati janji untuk menikahi karena berkaitan dengan harga diri serta harkat dan martabat pihak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak tercantum secara konkrit, yang terdapat hanya Perjanjian Kawin yang pengertian serta pengimplementasiannya berbeda jauh dengan Janji Kawin. Sedangkan jika merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat satu pasal yang menyingung, yakni pasal 58 KUHPer:

*“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain. Dalam pada itu tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan”.*

Pasal 58 KUHPer tersebut merumuskan tiga hal. *Pertama*, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. *Kedua*, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. *Ketiga*,

---

5 M.Lutfi Cahkim. 2012. *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam*. <http://www.lutfichakim.com>. Diunduh pada 10 april 2018

masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.<sup>6</sup>

Pengumuman yang dimaksud dalam Pasal 58 KUHPer, merupakan pemberitahuan yang harus dilakukan, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui surat yang dengan cukup jelas memperlihatkan niat kedua calon suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu harus dibuat sebuah akta oleh Pegawai Catatan Sipil.<sup>7</sup>

Terkait hal tersebut terdapat kasus di Pengadilan Makassar pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/PDT.G/2014/PN MKS tentang janji kawin. Dalam kasus tersebut pria yang kemudian disebut dengan DST berpacaran dengan LMB. Awal perkenalan mereka melalui kedua orangtuanya, selama masa pacaran berjalan normal hingga lanjut pada tahap yang lebih serius dengan disepakatinya pada tanggal 22 februari 2014 untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian atas dasar kesepakatan tersebut dilakukannya berbagai ritual adat dan resmi melakukan acara lamaran menurut adat Toraja di rumah LMB pada 17 Oktober 2013. Namun, ditengah perjalanan menuju hari H, DST dan CUT (ayahnya) tiba-tiba membatalkan segala persiapan seperti gedung pernikahan maupun salon yang telah diboeking, sekaligus menghubungi pihak gereja terkait pembatalan acara pernikahan tersebut.

Dari kasus tersebut, LMB menggugat DST dan CUT atas gugatan wanprestasi (Cidera Janji) yang menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial.

Dalam sidang gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar

---

<sup>6</sup> Mys/CR-7. 2009. *Tidak Menepati Janji Menikahi Adalah PMH*.  
<http://www.hukumonline.com>. Diunduh pada 10 april 2018

<sup>7</sup> Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memutuskan pihak DST untuk melakukan biaya gantirugi kepada LMB atas dasar perbuatan Wanprestasi, karena pembatalan pernikahan secara sepihak.

Sedangkan jika merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003 terkait kasus yang serupa. Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut berbeda dalam hal penerapan hukumnya. Karena Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan menghukum HW (tergugat) membayar sejumlah ganti rugi yang diderita WT (penggugat).<sup>8</sup> Dan dalam putusan atas perkara lain, dijelaskan juga dalam artikel yang sama, MA secara tegas menyatakan tidak menepati perjanjian untuk melangsungkan pernikahan adalah Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Karena itu pula, tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada penggugat untuk pemulihan nama baik penggugat.

Terkait ganti kerugian, Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan Penggantian ganti rugi secara materiil dan immateriil. Penggantian ganti rugi yang dimungkinkan akibat adanya wanprestasi, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, terdiri dari 3 unsur yaitu;

1. **Biaya**, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
2. **Rugi**, yaitu kerugian karena kerusakan/ kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
3. **Bunga**, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

---

<sup>8</sup> Salinan putusan Mahkamah Agung RI No. No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003

Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2)

KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya

*“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.*

Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang isinya:

*“Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”*

Dalam memutuskan suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dengan mengetahui secara obyektif duduknya perkara. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.<sup>9</sup> Selain itu, dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit : Liberty. Hal. 165

<sup>10</sup> Ibid. hal. 168

Untuk menciptakan putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut memang tidak mudah. Apalagi tuntutan keadilan, karena konsep keadilan itu tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya.<sup>11</sup> Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam kasus pembatalan pernikahan secara sepihak dengan mengangkat judul **ANALISA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 82/Pdt.G/2014/PN MKS. TERKAIT PEMBATALAN PERNIKAHAN SECARA SEPIHAK.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/PDT.G/2014/PN MKS. memutuskan perbuatan pembatalan pernikahan secara sepihak sebagai perbuatan wanprestasi ?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/PDT.G/2014/PN MKS. Dilihat dari aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/PDT.G/2014/PN MKS. memutuskan

---

<sup>11</sup> Fence M. Wantu. 2012. "Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, ". Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diunduh pada 23 April 2018. Hal. 481



perbuatan pembatalan pernikahan secara sepihak sebagai perbuatan wanprestasi.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/PDT.G/2014/PN MKS. Terkait pembatalan pernikahan sepihak yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya

- 1) Bagi Mahasiswa memberikan tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata terkait hukum perkawinan tentang pembatalan pernikahan secara sepihak
- 2) Bagi Penegak Hukum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi agar dapat lebih seksama dalam memutuskan suatu perkara perdata terkait pembatalan pernikahan secara sepihak
- 3) Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan kontribusi terkait akibat hukum dari pembatalan pernikahan secara sepihak

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam hal untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata terkait hukum pembatalan

pernikahan secara sepihak, sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang penulis gunakan ialah metode hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>12</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>13</sup>

### **2. Jenis Bahan Hukum**

Data dalam penulisan ini adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Yang mana dalam hal ini data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti

---

12 Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang. Penerbit : Bayumedia Publishing. Hal. 295.

13 Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta. Penerbit : Ghalia Indonesi. Hal. 13-14.

buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.<sup>14</sup> Bahan Hukum dalam

penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan

perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan terkait yang

terdiri dari:

1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil

karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi

pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan

menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin

ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur

inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi

dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu,

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,

---

14 Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. Penerbit : PT. Hanindita Offset. Hal. 56

menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya pembatalan pernikahan secara sepihak.

#### **4. Analisa Bahan Hukum**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diawali dengan subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang pemaparan berbagai kajian teoritik yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti, yakni terkait dengan pembatalan pernikahan secara sepihak. Antara lain bersumber dari berbagai macam himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, Jurnal, dan Buku Hukum. Penulis dalam hal ini membaginya menjadi 5 (lima) subbab, yaitu meliputi tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan, tinjauan umum tentang wanprestasi, tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan tinjauan umum tentang tujuan hukum.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi mengenai uraian dari hasil analisis penulis terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/PDT.G/2014/PN MKS. tentang perbuatan pembatalan pernikahan secara sepihak ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang didapat dari metode pendekatan dengan bahan-bahan hokum terkait pembatalan pernikahan secara sepihak.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini terbagi dalam dua subbab, yakni kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang penulis teliti dan analisis.

